

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi manusia di dunia ini membawa perkembangan yang pesat bagi seluruh elemen kehidupan. Manusia berusaha untuk menemukan sesuatu yang menjadi identitas dan kekhasan bagi peradabannya. Peradaban manusia tentu membawa banyak perubahan dan perkembangan bagi manusia termasuk pola pikir yang primitif menuju suatu pola pikir yang lebih modern yang berimplikasi pada perubahan hidup. Namun, di sepanjang perjalanan menuju suatu pola hidup yang modern, ada landasan-landasan mendasar yang mendorong manusia untuk melangkah lebih jauh dari pola hidup yang sebelumnya. Tindakan-tindakan untuk melakukan perubahan dalam seluruh rangkaian kehidupannya tentu memiliki benturan. Ada aspek-aspek yang dipertahankan dan ada juga aspek-aspek yang dihapus karena dianggap tidak sesuai dengan peradaban yang ada. Peradaban manusia bermula ketika manusia berusaha untuk menelaah lebih jauh tentang realitas yang ada di sekitarnya. Realitas yang ada mendorong manusia untuk menemukan suatu konsep hidup yang lebih bermakna dan kemudian diadopsi menjadi suatu kebiasaan karena dianggap cocok dan sesuai dengan realitas hidup. Konsep itu kemudian dihidupi dan diwariskan secara turun-temurun. Usaha mewariskan setiap penemuan melalui realitas hidup dibutuhkan figur yang menjadi penggerak, penjaga dan pemberi teladan yang penuh tanggung jawab bagi setiap anggota kelompok yang dipimpinnya. Pribadi atau orang tersebut dikenal dengan istilah pemimpin.

Pemimpin dan kepemimpinan merupakan dua hal yang berbeda. Pemimpin memberikan arti bagi tokoh atau figur yang sedang memimpin sedangkan kepemimpinan merupakan cara-cara yang dipakai oleh seorang pemimpin dalam memimpin orang-orang yang ada dalam suatu wilayah atau organisasi tertentu. Kepemimpinan adalah suatu proses yang melibatkan pemimpin, yang dipimpin, situasi dan kondisi yang berlaku serta bagaimana komunikasi dan interaksi antara

pemimpin dan yang dipimpin.¹ Memimpin pada hakekatnya adalah kepengikutan. Dengan kata lain, adanya keinginan orang-orang untuk mengikuti yang akan dibuat seseorang yang menjadi pemimpin. Oleh karena itu, walaupun keduanya terlihat berbeda namun tetap merupakan satu kesatuan, sebab keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Tanpa pemimpin cara-cara untuk memimpin tidak bisa didefinisikan sebab itu berkaitan langsung dengan figur yang bersangkutan ataupun sebaliknya tanpa kepemimpinan (cara/metode) seorang pemimpin tidak bisa berbuat sesuatu secara terarah dan terstruktur dalam meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan stabilitas hidup bersama. Dalam menjalankan tugas-tugas yang ada, seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Hal ini penting karena seorang pemimpin merupakan *public figure*, yaitu memiliki kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang lain melalui, sikap hidup, kata-kata dan tindakan. Ketiga aspek tersebut menjadi corak dasar bagi seorang pemimpin dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Sebab tolak ukur untuk sebuah kehidupan yang ideal juga bergantung dari pola hidup yang dihidupi oleh pemimpinnya. Pemimpin dengan gaya kepemimpinannya yang bijaksana mampu menghadirkan sebuah situasi ideal dalam lingkup yang dipimpinnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masyarakat tanpa pemimpin seperti perahu tanpa kapten. Menurut John Antonakis dan David V. Day “*Leadership is a formal or informal contextually rooted and goal-influencing process that occurs between a leader and a follower, groups of follower or institutions*”.² Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses formal atau informal yang berakar secara kontekstual dan bertujuan untuk saling mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut, sekelompok pengikut atau institusi.

Dalam berbagai sektor kehidupan terdapat kelompok-kelompok sosial masyarakat yang membutuhkan seorang pemimpin dengan tugas dan perannya masing-masing seperti presiden, kepala sekolah atau kepala perusahaan (CEO), *Ria Bewa*, dan *Mosa Laki* yang menjadi tokoh promotor dalam mengatur dan

¹Herman Musakabe, *Pemimpin dan Krisis Multidimensi* (Kupang: Yayasan Citra Insani Pembaru, 2001), hlm. 138.

²John Antonakis dan David V. Day (ed.), *The Nature Of Leadership* (Los Angeles: Sage, 2004), hlm. 5.

menertibkan suatu kelompok sosial tertentu. Namun sebelum mengenal kepemimpinan dengan *job description*nya masing-masing seperti sekarang ini, masyarakat primitif pada umumnya mengenal sosok pemimpin hanya dalam ranah etnik. Kepemimpinan etnik merupakan suatu pola kepemimpinan sosial masyarakat yang bersifat tradisional yang menjunjung tinggi nilai-nilai atau norma-norma adat, ritus-ritus, aturan-aturan dan tradisi-tradisi yang ditemukan serta dihidupi secara turun-temurun yang dibingkai dalam suatu budaya tertentu.

Kebudayaan merupakan manifestasi dari upaya yang dirangsang oleh kompleksitas eksistensial manusia untuk mencari puncak-puncak martabatnya sendiri.³ Budaya menjadi identitas dari masyarakat yang menghidupi suatu tradisi tertentu secara turun-temurun karena menganggapnya relevan dengan situasi yang ada. Adat atau kebiasaan muncul dari sekelompok orang yang menganggap bahwa hidup juga butuh aturan yang mampu mengikat semua orang yang bernaung di bawahnya. Pembentukan masyarakat adat dipengaruhi oleh suatu situasi hidup yang memiliki kekerabatan yang akrab atau dikenal dengan istilah sedarah. Keterikatan ini, mampu memberikan dampak positif sekaligus negatif dalam kehidupan, sehingga tidak mengherankan jika terdapat hal-hal yang sulit untuk dijelaskan karena masyarakat yang berada di bawah payung adat dipaksa untuk mengikuti segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan adat yang ada sekalipun tindakan tersebut tidak dipahami dan tidak bisa dijelaskan secara rasional.

Adat merupakan serangkaian aturan-aturan dan ritus-ritus yang dihidupi dalam sebuah kelompok masyarakat tertentu karena dianggap relevan dan diyakini sebagai sesuatu yang tepat untuk dijalankan. Secara sederhana terdapat tiga elemen penting dalam sebuah adat yakni ritus-ritus, aturan-aturan dan tradisi. *Pertama*, Ritus merupakan upacara yang dijalankan untuk menghormati atau meminta sesuatu dari Wujud Tertinggi dengan cara-cara konvensional. *Kedua*, Aturan-aturan merupakan larangan-larangan yang dibuat guna mengatur stabilitas masyarakat yang terdapat di dalamnya. Aturan-aturan tersebut biasanya dibuat oleh pemimpin/tokoh adat beserta seluruh jajarannya yang kemudian dipromulgasikan. *Ketiga*, Tradisi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dihidupi secara turun-

³Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Kebudayaan Proses Realisasi Manusia* (Bandung: Yrama Widya, 2017), hlm. 13.

temurun, karena dianggap layak untuk dipertahankan. Tradisi dihidupi karena orang telah diindoktrinasi bahwa jika menyimpang dari ketetapan yang ada maka akan mendapat musibah atau masalah. Ketiga elemen tersebut membentuk sebuah pola hidup yang mampu mengikat dan mempersatukan masyarakat untuk hidup sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang tertuang didalamnya. Eksistensi adat menjadikan manusia untuk menjalani suatu pola hidup yang lebih terstruktur walaupun masih sangat jauh dari kesempurnaan. Hal ini dikarenakan sifat memaksa yang terdapat dalam aturan-aturan adat dan ketergantungan masyarakat terhadap hal-hal yang mistis magis masih sangat tinggi. Hal itu menyebabkan masyarakat adat takut untuk berbuat sesuatu tanpa adanya persetujuan dari para petinggi adat.

Adat dan seluruh elemen yang terdapat di dalamnya, juga membutuhkan figur tertentu yang dianggap mampu untuk dapat mempertahankannya. Orang-orang tersebut membentuk suatu kelompok untuk menjaga stabilitas adat. Orang-orang yang terpilih itu, dipercaya dan yakin memiliki kemampuan yang baik dalam menjembatani hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam dan manusia dengan manusia. Dengan kata lain, orang tersebut bisa mendekatkan manusia dengan alam dalam menjalani ritus-ritus adat, menjadi teladan hidup sesuai dengan aturan-aturan adat dan bisa menjaga tradisi-tradisi yang telah diwariskan. Figur-figur tersebut dikenal dengan istilah pemimpin. Pemimpin merupakan tokoh yang mampu mengayomi masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat. Pemimpin yang ideal mampu mengubah tantangan menjadi peluang dalam meningkatkan kualitas hidup bersama (*Bonum Commune*). Kehadiran pemimpin dalam masyarakat diibaratkan dengan seorang kapten kapal yang selalu siap untuk bertarung melawan samudera demi keselamatan dan kebahagiaan para penumpangnya. Dalam hal ini, keahlian dan kebijaksanaan dalam membaca peluang pun menjadi hal yang urgen agar kapal tersebut dapat berlayar dengan baik dan para penumpang pun tiba dengan selamat.

Perkembangan peradaban manusia yang semakin maju menghadirkan paradigma baru bagi dunia saat ini. Masyarakat adat yang memiliki struktur dan gaya kepemimpinan yang ideal seturut konteksnya kini perlahan-lahan mulai memudar bahkan beberapa tradisi dibuang atau dipertahankan untuk melegitimasi otoritas. Itu berarti budaya atau adat sudah tidak relevan lagi untuk dihidupi. Hal

itu berarti bahwa, ada faktor yang mendorong kelompok atau golongan tertentu untuk meninjau kembali validitas nilai-nilai, norma-norma, dan ritus-ritus dengan segala cita-cita dan harapan yang berlaku dalam sistem adat.⁴ Pergeseran ini terjadi karena adanya penemuan sistem baru yang mampu menggeser sistem lama atau dengan kata lain, struktur kepemimpinan adat sudah diganti dengan sistem pemerintahan modern yang diatur dengan cara yang lebih baik. Hadirnya sistem pemerintahan yang berbasis modern memberi corak tersendiri pada perkembangan kualitas kehidupan manusia masa kini. Manusia diatur berdasarkan norma-norma yang dirancang dengan sebuah prosedur yang jelas dan *valid*. Selain itu, struktur kepemimpinannya pun relative teratur sebab pembagian tugas-tugasnya sangat jelas. Pola perubahan ini juga dirasakan oleh masyarakat desa Mbengu yang pada awalnya memiliki sistem adat yang baik.

Pada zaman dahulu orang mengenal masyarakat Mbengu dengan sebutan Suku Mbengu atau dalam bahasa setempat disebut *Kunu Mbengu*. Kunu Mbengu mendiami wilayah Maulo'o Kecamatan Paga sebagai daerah central saat ini. Kunu Mbengu pada awalnya hidup di bawah otoritas adat yang dipimpin langsung oleh *Ria Resi Bewa Langga* (Pimpinan tertinggi). *Ria Resi Bewa Langga* kemudian membentuk rekan-rekan kerjanya untuk membantunya dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pembentukan ini kemudian dikenal dengan istilah *Mosalaki-Mosalaki*. Pembentukan kolegalitas adat ini dilatarbelakangi oleh luasnya wilayah kekuasaan yang dimilikinya. Wilayah-wilayah kekuasaan yang dimiliki oleh *Ria Bewa* diperoleh dengan menjajah suku-suku yang ada di sekitarnya melalui perang antar suku.

Seiring berkembangnya pengetahuan manusia, eksistensi budaya perlahan-lahan mulai mengalami perubahan. Terobosan baru kini mulai diterapkan dengan sebuah sistem yang lebih terarah, yakni sistem pemerintahan modern. Sistem pemerintahan modern merupakan suatu sistem pemerintahan yang dibentuk sekelompok orang tertentu dengan sebuah sistem pemerintahan yang lebih maju dan terarah. Kepemimpinan dalam sistem pemerintahan modern nian jelas dan terstruktur serta memiliki visi dan misi sebagai pandu dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sistem pemerintahan yang berbasis modern berusaha untuk mengatur dan

⁴E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 49.

mensejahterakan masyarakat dengan pola hidup yang tepat dan cermat serta berusaha untuk menghapus kelas-kelas sosial masyarakat yang dibentuk oleh sistem adat. Di Indonesia sistem pemerintahan yang berbasis modern ini diterapkan dan dikenal dengan istilah pemerintahan demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat serta menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat. Sistem demokrasi menjadikan kepemimpinan lebih maju dan teratur sebab segala bentuk aturan dan norma-norma dirancang secara cermat dan tepat sesuai dengan konteks hidup. Aturan-aturan dan dasar hidup tersebut tertuang secara eksplisit dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kehadiran sistem pemerintahan modern tentu saja memberikan dampak positif sekaligus negatif bagi perkembangan sistem kepemimpinan etnik. Namun, di tengah perkembangan yang ada, terdapat juga hal-hal yang dapat diadopsi oleh pemerintahan modern dari sistem yang telah dihidupi dan dijalankan oleh pemerintahan etnik. Tidak bisa dimungkiri bahwa perkembangan yang ada sekarang tentu memiliki hubungan dengan perkembangan-perkembangan yang telah terjadi sebelumnya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan etnik tentu memiliki warisan yang luhur bagi perkembangan sistem pemerintahan modern, sebab sebelum sistem pemerintahan modern terbentuk, terlebih dahulu sistem pemerintahan etnik dihidupi.

Pemerintahan etnik dan pemerintahan modern merupakan dua hal yang berbeda namun bila ditelaah lebih jauh keduanya memiliki hubungan yang erat dalam meningkatkan perkembangan hidup manusia. Etnik hadir sebagai corak dasar bagi pemerintahan modern, sebab dari kekurangan dan kelebihan pemerintahan etnik diterapkan dan diperbaiki sistem pemerintahan modern. Untuk melihat hubungan atau korelasi antara keduanya (Sistem etnik dan sistem modern) maka peran pemimpin beserta seluruh jajarannya sangatlah urgen. Pemimpin hendaknya memiliki sikap yang terbuka pada sistem. Hal itu berarti bahwa, ia tahu memberikan terobosan-terobosan baru bagi perkembangan kehidupan agar eksistensi manusia dapat berkembang dari hari ke hari. Bertolak dari hal itu, munculah pepatah Mbengu Kuno yang mengatakan bahwa "*Ria Bewa dau tu'a ngere su'a maku ngere watu*" (Seorang pemimpin hendaknya kuat seperti baja dan

keras seperti batu).⁵ Pepatah ini menggambarkan seorang pemimpin yang kuat dan tahan banting dalam menghadapi setiap persoalan dan konflik yang sedang dan akan terjadi. Pemimpin tertinggi beserta jajarannya memiliki kuasa penuh dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinannya. Selain itu, sistem pemerintahan etnik cenderung bersifat monarkis sedangkan pemimpin modern lebih bersifat demokratis. Tradisi Mbengu juga menerapkan model kepemimpinan monarki. Karena seorang pemimpin diangkat berdasarkan garis keturunan sehingga dalam sistem pemerintahan etnik setiap individu dibagi ke dalam kelas-kelas sosial. Kelompok-kelompok masyarakat dijaga ketat dalam pergaulannya termasuk dalam hal jodoh. Namun dengan hadirnya sistem pemerintahan modern masyarakat dituntun untuk menghapus kelas-kelas sosial tersebut.

Pola perkembangan hidup yang semakin maju dan canggih dari hari ke hari membawa perubahan besar dalam hidup manusia saat ini. Masyarakat etnik yang pada awalnya memiliki sebuah sistem pemerintahan yang baik, perlahan-lahan mulai mengalami perubahan dan beralih fungsi serta peran, sebab segala aturan dan norma-norma yang telah dihidupi oleh sistem etnik perlahan-lahan dimodifikasi bahkan dihapus oleh sistem pemerintahan modern karena dianggap sudah tidak relevan dengan konteks masyarakat. Oleh karena itu, realitas ini secara tidak langsung membatasi wewenang sistem etnik sebagaimana lazimnya sebab aturan dan hukum-hukum yang dibuat oleh sistem pemerintahan modern diatur secara jelas dan memiliki landasan-landasan yang kuat dan valid. Bertolak dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa, kekuasaan sepenuhnya berada di bawah otoritas pemerintahan modern dan masyarakat adat dituntut untuk mengikuti semua ketetapan yang ada. Pengaruh kebijakan ini, kemudian membawa perubahan hidup dalam masyarakat adat, sebab seluruh rangkaian upacara adat yang pernah dihidupi perlahan-lahan pudar bahkan hilang karena membutuhkan penyesuaian yang tepat dengan tata aturan yang telah dipromulgasikan oleh sistem pemerintah modern. Oleh karena itu, *Ria Bewa* beserta *Mosa Lakinya* sudah tidak memiliki wewenang penuh dalam mengatur stabilitas masyarakat. Hal tersebut nampak jelas pada pengembalian wilayah-wilayah kekuasaan oleh sistem pemerintahan modern

⁵Hasil wawancara dengan Yohanes Brekmans Mangu, *Ria Bewa* Suku Mbengu di Maulo'o, pada 16 Maret 2023.

kepada penduduk asli yang pernah dikuasai dan dijajah oleh sistem pemerintahan etnik. Dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintahan modern berusaha untuk membangun atau mengatur kembali pola hidup masyarakat yang lebih adil dan makmur seiring berjalannya waktu yang membutuhkan adaptasi yang tararah terhadap perkembangan yang sedang dan akan terjadi.

Di antara sistem pemerintahan etnik dan sistem pemerintahan modern, terdapat hal-hal yang dapat dipertahankan dan tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu, penulis berusaha menelaah dan menjelaskan kembali hubungan antara keduanya. Penulis berikhtiar untuk menghubungkan persamaan tugas-tugas yang pernah dijalankan oleh sistem pemerintahan etnik dengan tugas-tugas yang dijalankan oleh sistem pemerintahan modern yang ditinjau dari deskripsi tugas-tugas di antara keduanya, apakah sistem dan tugas-tugas yang pernah dijalankan secara etnik dihidupi atau dilenyapkan oleh pemerintahan modern? sebab sebelum pemerintahan modern hadir seperti saat ini, peradaban manusia pada awalnya berpegang teguh pada sistem adat. Dengan demikian, pengaruh sistem etnik terhadap sistem modern turut berperan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis berusaha untuk mengkajinya dengan judul: **MENELAAH KEPEMIMPINAN ETNIK SUKU MBENGU DALAM PERBANDINGAN DENGAN SISTEM KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN MODERN DI DESA MBENGU KECAMATAN PAGA.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan realitas yang terjadi seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang hendak dibahas dalam karya tulis ini ialah:

1. Apa yang dimaksudkan dengan kepemimpinan etnik Suku Mbengu?
2. Siapakah Suku Mbengu?
3. Apa yang dimaksudkan dengan sistem kepemimpinan pemerintahan modern di desa Mbengu?
4. Siapa itu masyarakat desa Mbengu?
5. Bagaimana perbandingan antara sistem kepemimpinan etnik suku Mbengu dengan sistem kepemimpinan pemerintahan modern di desa Mbengu Kecamatan Paga?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok persoalan yang telah dikemukakan, ada beberapa tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam karya tulis ini antara lain:

1. Untuk menjelaskan kepada masyarakat desa Mbengu tentang sistem kepemimpinan etnik suku Mbengu yang pernah dihidupi.
2. Untuk mengenal lebih jauh tentang suku Mbengu.
3. Untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang sistem kepemimpinan pemerintahan modern di desa Mbengu.
4. Untuk lebih mengenal kehidupan masyarakat desa Mbengu.
5. Untuk menelaah lebih jauh tentang perbandingan antara sistem kepemimpinan etnik suku Mbengu dengan sistem kepemimpinan modern di desa Mbengu kecamatan Paga.

1.4 Metode Penulisan

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, Penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Melalui metode penelitian lapangan, Penulis melakukan wawancara dengan para ketua-ketua adat yang diyakini memiliki pengetahuan yang luas terhadap kehidupan masyarakat adat setempat sedangkan dalam metode studi kepustakaan Penulis berusaha mengumpulkan sumber-sumber yang tersedia dari berbagai buku, majalah dan artikel-artikel yang berkaitan langsung dengan judul skripsi ini. Sumber-sumber yang dijadikan sebagai pedoman penulisan ini menjadi tolok ukur bagi penulis untuk mengamati, menganalisis dan membandingkan setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat Suku Mbengu dari setiap generasi sesuai dengan sistem kepemimpinan yang diterapkan. Melalui kedua metode ini, gagasan-gagasan atau argumen-argumen yang hendak disampaikan oleh Penulis semakin diperkuat dengan adanya sumber-sumber yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.5 Sistematika Penulisan

Bab pertama berisi pendahuluan. Pada bab ini, Penulis menguraikan gambaran umum dari tulisan ini yang terdiri dari latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Bab kedua penulis menjelaskan pengertian, jenis-jenis dan fungsi kepemimpinan secara umum. Penulis juga berusaha sejauh mungkin untuk menjelaskan pandangan mengenai kepemimpinan etnik secara terperinci.

Bab ketiga terdiri dari beberapa bagian yang hendak dijelaskan oleh penulis. Pertama tama penulis menguraikan secara terperinci tentang selang pandang etnik Mbengu yang terdiri dari beberapa sub tema yakni berisi tentang letak geografis, struktur kepemimpinan, pembagian wilayah-wilayah kekuasaan, tugas-tugas seorang pemimpin dalam etnik Mbengu dan tradisi-tradisi utama yang dihidupi oleh masyarakat Etnik Mbengu. Pada bab ini juga penulis menguraikan sistem pemerintahan modern di Desa Mbengu, konsep pemerintahan modern, struktur kepemimpinan pemerintahan modern, tugas-tugas pemerintahan modern. Selain itu, penulis juga menjelaskan konsep, ciri-ciri, fungsi dan tujuan serta struktur kepemimpinan sebuah desa. Setelah menjelaskan gambaran eksistensi sebuah desa secara keseluruhan, pada sub tema selanjutnya penulis berusaha untuk menghubungkannya dengan hal-hal yang terjadi di desa Mbengu. Hal ini dimaksudkan agar *locus* pembicaraan lebih terarah dan mudah untuk dipahami. Penjelasan mengenai Desa Mbengu terdiri dari letak geografis, visi dan misi.

Bab keempat merupakan bagian inti dari tulisan ini. Pada bagian ini penulis menghubungkan tentang sistem kepemimpinan etnik dan sistem pemerintahan modern. Penulis juga menjelaskan perbandingan kelebihan dan kekurangan dari kedua sistem pemerintahan tersebut. Selain itu, penulis juga menganalisis persamaan tugas-tugas yang pernah dijalankan oleh pemerintahan etnik dan yang sedang dijalankan oleh pemerintahan modern. Penulis menjelaskan hal tersebut berdasarkan data dan menganalisis hubungan antara kepemimpinan etnik dengan sistem pemerintahan modern.

Bab kelima merupakan bagian penutup. Pada bagian ini penulis menjabarkan secara keseluruhan tema-tema pokok yang terdapat dalam skripsi ini, yang termuat dalam kesimpulan. Selain itu, penulis juga memberikan saran kepada

elemen masyarakat desa Mbengu dalam mempertahankan warisan budaya yang menjadi identitas mereka agar tidak hilang dan musnah akibat hadirnya sistem pemerintahan yang berbasis modern.